

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 telah melahirkan gagasan untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 maka terjadi reformasi demokratisasi dan berimplikasi pada struktur formal ketatanegaraan. Sebagai bagian dari sebuah proses, demokrasi haruslah diperjuangkan melalui penegakan berbagai ketentuan sekaligus operasionalisasi perangkat-perangkatnya agar dapat berperan dalam peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat.

Pengaruh globalisasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan khususnya reformasi yang berawal dari krisis moneter dan ekonomi yang mendorong semangat partisipasi politik rakyat yang menampilkan konsep demokrasi dan transparansi setelah mengalami perubahan yang sangat mendasar yang ditandai dengan berakhirnya orde baru, membawa berbagai pengaruh perubahan, baik perubahan positif maupun perubahan negatif.

Hal-hal positif antara lain terbukanya sumbat aspirasi politik, terbukanya kemerdekaan pers, adanya kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat dan berkumpul yang bermuara pada peningkatan partisipasi rakyat secara signifikan. Sedangkan hal-hal negatifnya antara lain timbulnya *euphoria* politik pada diri masyarakat yang tidak diimbangi dengan pendidikan politik. Hal itu menyebabkan sikap arogansi masyarakat baik terhadap pemerintah maupun terhadap wakilnya

di lembaga legislatif. Salah satu ciri partisipasi politik rakyat antara lain adanya input yang berbentuk aspirasi masyarakat yang secara teknis dapat dikatakan sebagai tuntutan dan dukungan.

Aspirasi merupakan ungkapan ketidakpuasan atau keinginan kuat dari masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah dalam bentuk pernyataan sikap, pendapat, kritikan, harapan, masukan dan saran. Masyarakat pada umumnya berhak menyampaikan aspirasinya berkaitan dengan hal – hal mengenai pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan daerah. Namun, karena banyaknya aspirasi yang masuk sehingga pemerintah mendapatkan kesulitan dalam penyampaian untuk menanggapi aspirasi – aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.

Keberadaan peran dan fungsi legislatif saat ini dirasakan kurang mendapat simpati masyarakat. Keberadaan mereka justru cenderung pada upaya untuk mengakali anggaran yang hanya ditujukan untuk kepentingan oknum pribadi maupun kelompoknya saja. Usulan dan keinginan masyarakat nyaris tidak mendapat respon dari anggota dewan yang seharusnya merealisasikan tiga fungsi legislatif yaitu : Fungsi Legislasi, fungsi Anggaran dan Fungsi 3 Pengawasan. Masyarakat berhak untuk menyampaikan aspirasi tetapi tidak mendapatkan direspon oleh pemerintah.

Kunjungan kedaerah pemilihan (Kunker) merupakan salah satu kegiatan yang diharapkan dapat menjadi salah satu saluran penyampaian aspirasi masyarakat. Kegiatan kunjungan kerja daerah ini berperan sebagai penyerapan aspirasi masyarakat kepada anggota legislatif yang berasal dari daerahnya untuk ditindak lanjuti dan mencari solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat

tersebut, serta sebagai sarana untuk laporkan kinerja anggota dewan dan tanggung jawabnya sebagai orang yang mewakili masyarakat.

Setiap anggota dewan memiliki tanggung jawab didalam kegiatan kunjungan kerja daerah pemilihan untuk mengedukasi masyarakat serta mengayomi masyarakat, agar masyarakat dapat menjadi mandiri didalam membangun kehidupannya baik secara ekonomi, pendidikan, kesehatan dan prasarana untuk masyarakat agar hidup sejahtera.

Kegiatan acara kunjungan kerja daerah pemilihan dapat dilaksanakan pada masa sidang dan masa reses yang diatur didalam peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib. Kujungan ke daerah pemilihan dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan masukan dan informasi dari masyarakat mengenai permasalahan yang terjadi dan mencari solusi penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat, serta pertanggung jawaban dari Anggota Dewan terhadap penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan pada masa reses.

Penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi di masyarakat menjadi faktor yang sangat penting sebagai anggota dewan perwakilan rakyat, penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan masyarakat tersebut, selain faktor ekonomi juga perlu diimbangi dengan pendidikan yang baik kepada masyarakat. UUD 1945 menyatakan, "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan" (Pasal 33 Ayat 1); "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara" (Pasal 33 Ayat 2); "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besar kemakmuran rakyat” (Pasal 33 Ayat 3); dan ”Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”

Bapak Mayjen (Purn) H. Asril Hamzah Tanjung merupakan seorang wakil rakyat, yang memiliki latar belakang seorang Purnawirawan Mayor Jendral TNI bintang 2 (dua), yang berasal dari Partai Gerindra untuk mengabdikan dirinya kepada masyarakat sebagai wakil rakyat anggota DPR RI melalui pemilihan umum legislatif pada tahun 2014. Untuk menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I, Bapak Asril menjalankan program-program kepada masyarakat di Jakarta Timur.

Program yang dibangun dan dijalankan oleh Mayjend (Purn) H. Asril Hamzah Tanjung merupakan hasil dari pembahasan dan penyerapan aspirasi masyarakat dari kegiatan kunjungan kerja daerah pemilihan baik itu dimasa masa sidang maupun di masa reses. Berikut adalah program yang dijalankan Bapak Asril sebagai berikut :

1. Beasiswa gratis untuk masuk perguruan tinggi bagi yang berprestasi.
2. Bekerjasama dengan mitra kerja DPR RI Komisi I yaitu Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk membangun program yang disebut Palapa Ring di seluruh Indonesia,
3. Ambulan gratis untuk seluruh masyarakat.
4. Rumah Aspirasi (Asril *Center*)
5. Penyuluhan untuk menjadi seorang *entrepreneur*.

Program tersebut merupakan alasan dari kegiatan ini diadakan guna untuk menerima masukan dan saran dari masyarakat, guna mengevaluasi kinerja dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan informasi program yang dijalankan.

Selain mensosialisasikan program diatas Bapak Asril Tanjung juga menyampaikan kinerjanya di DPR RI Komisi I yaitu :

1. Ikut ambil adil didalam pengadaan alusista Tentara Nasional Indonesia diataranya adalah pengadaan kapal selam, pesawat tempur, kapal perang, dan lain-lain untuk memperkuat TNI menjaga kedaulatan NKRI.
2. Manaikan gaji untuk TNI, Porli, dan BIN
3. Program Palapa Ring dengan Kominfo
4. Layanan Internet gratis
5. Membuat dan merancang Undang-Undang diantaranya adalah Undang-Undang ITE
6. Permasalahan yang ada di Indonesia, salah satunya adalah permasalahan Bank-Bank plat merah di Indonesia sudah mulai dikuasai oleh pihak asing.

(Sumber : Materi Kunker Asril Tanjung di Cipinang Muara)

Widodo mengatakan bahwa kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan Widodo (2006:78)

Kegiatan kunjungan kerja ini merupakan tanggung jawab anggota DPR RI didalam melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat. Aspirasi yang disampaikan

tentang masalah yang terjadi berpengaruh terhadap citra dari kinerja Anggota Dewan DPR RI dan Fraksi Partai politiknya.

Dalam satu tahun sidang, waktu kerja untuk DPR dibagi terbagi empat sampai lima masa persidangan. Dimana setiap masa persidangan terdiri dari masa sidang dan masa reses. Masa sidang adalah masa dimana DPR bekerja di dalam gedung DPR. Pada masa ini, berbagai aktivitas dilakukan Anggota Dewan di dalam kompleks gedung Senayan, mulai dari kegiatan rapat-rapat dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi (membentuk UU), fungsi anggaran (penetapan APBN), maupun fungsi pengawasan yang melibatkan rapat-rapat dengan pemerintah, sampai dengan kegiatan menerima dan memperjuangkan aspirasi rakyat, baik yang datang ke DPR secara individu maupun berkelompok (termasuk para demonstran).

Kunjungan kerja Bapak Asril Tanjung di Cipinang Muara selain untuk menerima masukan dan informasi, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat atas kinerja yang dilakukan oleh Bapak Asril Tanjung di DPR RI dan juga kinerja dari DPR RI itu sendiri.

Dalam menselaraskan kepentingan Anggota Dewan yang beragam, perlu dibentuk fraksi atau kelompok Anggota DPR yang memiliki pandangan politik yang sejalan guna memungkinkan anggota dewan menjalankan tugas dan wewenangnya agar menjadi optimal.

Kegunaan fraksi sendiri di DPR RI dijelaskan disitus resmi DPR RI yang diakses pada 15 maret 2019 yaitu “mengkoordinasikan kegiatan anggotanya demi mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi kerja Anggota Dewan. Fraksi juga

bertanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja anggotanya dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada publik” (www.dpr.go.id)

Peran fraksi dianggap sangat penting karena berperan sebagai pengoptimalan efektivitas dan efisiensi kinerja dari anggota DPR tersebut. Seperti yang dijelaskan bahwa efektivitas merupakan secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas merupakan suatu keefektifan, sebagai hasil dari segala sesuatu ataupun kegiatan. Menurut Sumardi Suryasubrata (1990:5) efektivitas adalah tindakan atau usaha yang membawa hasil.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa fraksi memiliki peran yang sangat penting untuk menselaraskan kegiatan anggota dewan, maka kinerja seorang anggota DPR RI akan sangat berpengaruh sekali kepada citra fraksi mereka sendiri

Citra adalah tujuan pokok bagi suatu organisasi atau perusahaan. Pengertian citra itu sendiri abstrak atau *intangibile*, tetapi wujudnya dapat dirasakan dari penilaian, baik semacam tanda respek dan rasa hormat dari publik sekelilingnya atau masyarakat luas terhadap organisasi atau perusahaan tersebut dilihat sebagai sebuah badan usaha yang dipercaya, profesional, dan dapat diandalkan dalam pembentukan pelayanan yang baik.

Menurut Ruslan dalam bukunya Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi dan Aplikasi (1998:63) menyebutkan bahwa landasan citra berakar dari :

“Nilai-nilai kepercayaan yang konkritnya diberikan secara individual dan merupakan pandangan atau persuasi, serta terjadinya proses akumulasi dari individu-individu tersebut akan mengalami suatu proses cepat atau lambat

untuk membentuk suatu opini publik yang lebih luas dan abstrak, yaitu sering dinamakan citra atau image.”

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut “**Efektivitas Kegiatan Kunjungan Kerja Daerah Pemilihan Jakarta I Masa Sidang 3 Tahun 2018 Mayjend (Purn) H. Asril Hamzah Tanjung Di Cipinang Muara Terhadap Citra Politik Fraksi Partai Gerindra**”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Seauhmana **Jangkauan Peserta** Kegiatan Acara Kunjungan Kerja Daerah Pemilihan Jakarta I Sidang 3 Tahun 2018 Mayjend (Purn) H. Asril Hamzah Tanjung Di Cipinang Muara Terhadap Citra Politik Fraksi Partai Gerindra ?
2. Seauhmana **Response Peserta** Kegiatan Acara Kunjungan Kerja Daerah Pemilihan Jakarta I Sidang 3 Tahun 2018 Mayjend (Purn) H. Asril Hamzah Tanjung Di Cipinang Muara Terhadap Citra Politik Fraksi Partai Gerindra ?
3. Seauhmana **Dampak Komunikasi** Kegiatan Acara Kunjungan Kerja Daerah Pemilihan Jakarta I Sidang 3 Tahun 2018 Mayjend (Purn) H. Asril Hamzah Tanjung Di Cipinang Muara Terhadap Citra Politik Fraksi Partai Gerindra?
4. Seauhmana **Proses Persuasif** Kegiatan Acara Kunjungan Kerja Daerah Pemilihan Jakarta I Sidang 3 Tahun 2018 Mayjend (Purn) H. Asril Hamzah

Tanjung Di Cipinang Muara Terhadap Citra Politik Fraksi Partai Gerindra ?

5. Sejauhmana Efektivitas Kegiatan Acara Kunjungan Kerja Daerah Pemilihan Jakarta I Sidang 3 Tahun 2018 Mayjend (Purn) H. Asril Hamzah Tanjung Di Cipinang Muara Terhadap **Kognisi** Politik Fraksi Partai Gerindra ?
6. Sejauhmana Efektivitas Kegiatan Acara Kunjungan Kerja Daerah Pemilihan Jakarta I Sidang 3 Tahun 2018 Mayjend (Purn) H. Asril Hamzah Tanjung Di Cipinang Muara Terhadap **Persepsi** Politik Fraksi Partai Gerindra ?
7. Sejauhmana Efektivitas Kegiatan Acara Kunjungan Kerja Daerah Pemilihan Jakarta I Sidang 3 Tahun 2018 Mayjend (Purn) H. Asril Hamzah Tanjung Di Cipinang Muara Terhadap **Sikap** Politik Fraksi Partai Gerindra ?
8. Sejauhmana Efektivitas Kegiatan Acara Kunjungan Kerja Daerah Pemilihan Jakarta I Sidang 3 Tahun 2018 Mayjend (Purn) H. Asril Hamzah Tanjung Di Cipinang Muara Terhadap **Motivasi** Politik Fraksi Partai Gerindra ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Suatu penulisan harus memiliki tujuan yang jelas dan pasti. Tujuan dalam suatu penulisa menunjukkan kualitas dan nilai penulisan tersebut. Berdasarkan atas latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

1.3.1 Maksud Penelitian

Bertolak dari Latar Belakang Penelitian diatas, maka maksud dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan Efektivitas Kegiatan Acara Kunjungan Kerja Daerah Pemilihan Jakarta I Sidang 3 Tahun 2018 Mayjend (Purn) H. Asril Hamzah Tanjung Di Cipinang Muara Terhadap Citra Politik Fraksi Partai Gerindra.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui **Jangkauan Peserta** Kegiatan Acara Kunjungan Kerja Daerah Pemilihan Jakarta I Sidang 3 Tahun 2018 Mayjend (Purn) H. Asril Hamzah Tanjung Di Cipinang Muara Terhadap Citra Politik Fraksi Partai Gerindra
2. Untuk mengetahui **Response Peserta** Kegiatan Acara Kunjungan Kerja Daerah Pemilihan Jakarta I Sidang 3 Tahun 2018 Mayjend (Purn) H. Asril Hamzah Tanjung Di Cipinang Muara Terhadap Citra Politik Fraksi Partai Gerindra
3. Untuk mengetahui Sejuahmana **Dampak Komunikasi** Kegiatan Acara Kunjungan Kerja Daerah Pemilihan Jakarta I Sidang 3 Tahun 2018 Mayjend (Purn) H. Asril Hamzah Tanjung Di Cipinang Muara Terhadap Citra Politik Fraksi Partai Gerindra
4. Untuk mengetahui Sejuahmana **Proses Persuasif** Kegiatan Acara Kunjungan Kerja Daerah Pemilihan Jakarta I Sidang 3 Tahun 2018

Mayjend (Purn) H. Asril Hamzah Tanjung Di Cipinang Muara Terhadap Citra Politik Fraksi Partai Gerindra

5. Untuk mengetahui Efektivitas Kegiatan Acara Kunjungan Kerja Daerah Pemilihan Jakarta I Sidang 3 Tahun 2018 Mayjend (Purn) H. Asril Hamzah Tanjung Di Cipinang Muara Terhadap **Kognisi** Politik Fraksi Partai Gerindra
6. Untuk mengetahui Efektivitas Kegiatan Acara Kunjungan Kerja Daerah Pemilihan Jakarta I Sidang 3 Tahun 2018 Mayjend (Purn) H. Asril Hamzah Tanjung Di Cipinang Muara Terhadap **Persepsi** Politik Fraksi Partai Gerindra
7. Untuk mengetahui Efektivitas Kegiatan Acara Kunjungan Kerja Daerah Pemilihan Jakarta I Sidang 3 Tahun 2018 Mayjend (Purn) H. Asril Hamzah Tanjung Di Cipinang Muara Terhadap **Sikap** Politik Fraksi Partai Gerindra
8. Untuk mengetahui Efektivitas Kegiatan Acara Kunjungan Kerja Daerah Pemilihan Jakarta I Sidang 3 Tahun 2018 Mayjend (Purn) H. Asril Hamzah Tanjung Di Cipinang Muara Terhadap **Motivasi** Politik Fraksi Partai Gerindra

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kontribusi dalam memperkaya khasanah pengembangan Ilmu Public Relations, khususnya dalam kunjungan Kerja (Kunker) Anggota DPR RI.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a) Untuk Peneliti

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan sekaligus menambah pengalaman dan menjadi metode pembelajaran dalam perkuliahan baik secara teori maupun secara lisan.

b) Untuk Pembaca

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan sekaligus menambah keilmuan secara teori maupun lisan.

c) Untuk Universitas

Sebagai referensi bagi mahasiswa UNIKOM pada umumnya, juga sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dan bagi Program Studi Ilmu Komunikasi konsentrasi humas pada khususnya, yang juga ingin melakukan penelitian dalam kajian yang sama.

d) Untuk DPR RI

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan didalam melakukan perbaikan untuk meningkatkan mutu kegiatan kunjungan kerja daerah pemilihan.